HARIAN UMUM NusaBali

BMP Siagakan Alat Berat di Alur Tukad Mati

MANGUPURA, NusaBali

Terhentinya pengerjaan proyek pembangunan long storage di muara Tukad Mati, wilayah Pata Sari, Lingkungan Jaba Jero, Kuta, membuat Dinas Bina Marga dan Pengairan (BMP) Kabupaten Badung harus putar otak. Akibat pengerjaan terhenti di tengah jalan, proyek senilai Rp 47 miliar itu dikhawatirkan tidak bisa selesai tepat waktu. Untuk itu, BMP kini menyiapkan skenario bagaimana mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti menyiapkan alat berat untuk memperlancar aliran Tukad Mati, sehingga kampung turis Kuta tak terendam.

Kabid Pengairan BMP Kabupaten Badung AA Dalem, Minggu (20/9), mengatakan, jika proyek berbarengan dengan musim penghujan, maka cukup berat. Potensi bagian hulu Tukad Mati yakni wilayah Seminyak dan Legian terendam banjir bisa kembali terulang seperti yang terjadi hampir setiap tahun.

Sebagai antisipasi, lanjutnya, BMP menyiapkan skenario jika hujan lebat turun. Yakni dengan meyiagakan alat berat untuk membantu laju air. "Tentu kami akan menyiapkan alat berat untuk memperlancar aliran air, karena alur utama air Tukad Mati dibelokkan ke alur sungai yang kecil. Pembelokan alur ini karena adanya pengerjaan konstruksi pemasangan panel. Di sanalah nanti akan kami siapkan alat berat," jelasnya.

Meski menyiapkan rencana alternatif, tetapi pihaknya berharap proyek bisa segera dilanjutkan. Sehingga pemasangan panel bisa selesai tepat waktu. Kalau tidak begitu, maka aliran air akan terhalang. "Jika proyek tidak selesai, kalau musim hujan laju air terhambat karena terhalang," bebernya. "Tapi kami yakin, proyek segera lanjut dan tidak ada banjir," tandas Gung Dalem, sapaan arab AA Dalem.

Ditanya perkembangan terkini dari mega proyek yang menelan anggaran puluhan miliar rupiah ini, Gung Dalem menyatakan, Pemprov Bali dan pemerintah pusat mulai memberikan rambu hijau kelanjutan proyek penataan Tukad Mati, Kuta. Dewan juga sudah menyatakan siap mendukung eksekutif. Sebagaimana diketahui, Komisi II DPRD Badung, beberapa waktu lalu telah melakukan peninjauan ke lokasi proyek. Anggota dewan yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Badung Nyoman Dirga Yusa berjanji akan mengawal dan mem*backup* agar proyek dapat dilanjutkan.

"Penataan Tukad Mati sangat vital, karena itu kami akan mem*backup* proyek ini sampai selesai," ujar Dirga Yusa, usai meninjau lokasi.

Dia pun mengapresiasi permohonan Pemkab Badung yang hendak menata di sepanjang 1.700 meter dan lebar 50 meter. Menurutnya sangat wajar selaku pemerintah melakukan lang-langkah untuk mengantisipasi terjadinya banjir. Sehingga, Dirga Yuda berharap tidak ada pihak yang mengkait-kaitkan dengan berbagai kepentingan lain. **as**

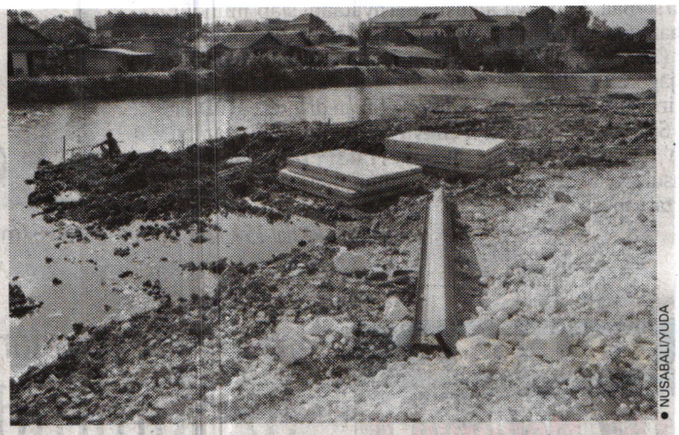

NUSABALI/YUDA

PROYEK pembangunan long storage Tukad Mati di Pata Sari, Lingkungan Jaba Jero, Kuta, Badung, dihentikan sementara. Untuk antisipasi banjir di musim hujan, BMP Badung menyiapkan alat berat di lokasi.

Edisi : Senin, 21 September 2015

Hal : 2

HARIAN UMUM NusaBali

FPDIP DPRD Bali Tolak Jual Aset

FPDIP mendesak evaluasi aturan penyewaan aset Pemprov Bali, terutama tanah yang luasnya di bawah 5 are.

DENPASAR, NusaBali

Sejumlah anggota Fraksi PDIP DPRD Bali menolak menjual beberapa aset milik Pemprov Bali yang berupa tanah dengan luas di bawah 5 are. Aset yang kini banyak disewakan itu diminta dievaluasi penyewaaanya dengan aturan yang jelas.

Anggota Fraksi PDIP yang juga Ketua Komisi I DPRD Bali I Ketut Tama Tenaya, mengemukakan, Fraksi PDIP telah mengeluarkan sikap menolak penjualan aset daerah. Penjualan aset tanah dengan luasan di bawah 5 are bukan solusi penataan aset. Karena justru hal tersebut melegalkan upaya kepentingan pihak tertentu menggerogoti aset pemprov. Termasuk nanti hasil penjualannya juga akan cenderung menimbulkan kebocoran-kebocoran.

"Siapa yang jamin tidak menimbulkan kebocoran? Kami di Fraksi PDIP sudah menolak dengan tegas. Aset-aset yang di bawah 5 are itu jangan dijual. Tidak boleh ada penjualan aset untuk siapapun. Kecuali tukar guling untuk kepentingan public dan dipakai untuk taman kota. Kalau aset yang tidak laku dikontrakkan ya buat taman," ujar Tama Tenaya, Minggu (20/9), di Denpasar.

Tama Tenaya mengatakan kalau hal ini dipaksakan Fraksi PDIP akan bersikap keras. Menurut politisi asal Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, ini, aset-aset yang disewakan kepada pihak ketiga dengan luasan 5 are sampai 10 are saja sekarang belum dikoreksi. "Harga sewanya masih murah-murah. Duitnya masuk ke mana, itu yang harus kita usut dulu. Siapa saja daftar penyewanya kita mau minta Biro Aset dan Gubernur mengumumkan sebagai upaya menciptakan akuntabilitas dalam pelaksanaan tata pemerintahan," tutur Tama Tenaya.

Kalau disewakan?"Disewakan okelah masih bisa kita toleransi. Tetapi evaluasi aturannya dulu. Maksimal disewa 5 tahun dengan harga yang sesuai. Jangan disamaratakan dengan kondisi daerah yang potensial dengan tidak potensial. Yang kita mau evaluasi aturan penyewaan dan harganya. Harga tanah sekarang itu mahal," ucap Dewan Pertimbangan DPD PDIP Bali, ini.

Sementara anggota Pansus Aset DPRD Bali Dewa Nyoman Rai Adi secara terpisah menyebutkan, Ketua Pansus Aset Pemprov Bali Ketut Adiarsa akan dipanggil ke DPRD Bali, Senin (21/9) pagi ini. "Kami minta lembaga panggil Pansus Aset. Besok (hari ini) akan rapat di DPRD Bali," ujar DewaRai Adi.

DewaRai Adi mengatakan pihak Pansus Aset tidak pernah sepakat menjual aset-aset tanah Pemprov Bali yang luasnya di bawah 5 are. Karena persoalan aset di Pemprov Bali sampai sekarang masih sedang dibahas. Terutama menyangkut ribuan aset tercecer milik Pemprov Bali. "Ada upaya mau dijual dan ini digulirkan di eksekutif melalui anggota dewan. Kami di Fraksi PDIP dan Pansus Aset menolaknya. Aset-aset sekarang saja belum selesai dibicarakan, sekarang sudah ada wacana mau dijual. *Nggak* segampang itu," ujar politisi asal Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Buleleng, ini.

Kata Dewa Rai Adi, aset-aset Pemprov Bali lebih baik ditata ulang dan proses administrasi yang benar. "Sekarang ada ribuan aset kita yang tercecer *nggak* jelas. Ada juga yang mau dikuasai pihak tertentu. Kalau aset ini tidak ditata dengan baik, habis nanti aset kita. Aset itu *kan* bisa mendatangkan pendapatan asli daerah kalau dikelola dengan baik. Sekali lagi kami tidak sepakat menjual," ujar Dewa Rai Adi.

Terkait dengan sikap dewan ini Kepala Biro Aset Ketut Adiarsa belum bisa dimintai komentar. Saat yang bersangkutan dikonfirmasi *NusaBali* melalui ponselnya, mailbox. **nat**

Edisi : Senin, 21 September 2015

Hal : 2

HARIAN UMUM NusaBali

Porprov Usai, Muncul Beban Biaya Miliaran Perawatan Aset

★ Bupati Pikirkan Pola Pengelolaan

• NUSABALI/SUDIRTA

KONDISI veneu kolam renang pasca Porprov Bali ke XII digelar,

SINGARAJA, NusaBali

Pemkab Buleleng kini dihadapkan pada persoalan beban pemeliharaan sarana dan prasarana dari ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Bali ke XII yang telah sukses terlaksana. Diperkirakan biaya perawatan itu mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya.

Data dihimpun, sarana dan prasana dari ajang Porprov Bali ke XII begitu banyak. Tentu sarana dan prasaran itu butuh perawatan. Beberapa diantaranya, biaya perawatan itu bisa ditangani KONI dengan adanya kegiatan yang rutin dilaksanakan. Namun tidak sedikit pemeliharaan sarana dan prasarana lainnya sulit ditangani karena membutuhkan dana yang besar. Salah satu contohnya adalah venue kolam renang di Jalan Pidada, Kelurahan Banyuasri.

Sumber terpercaya di kalangan KONI Buleleng menyebut, biaya perawatan venue kolam renang itu mencapai Rp 80 juta lebih dalam sebulan. Belum lagi biaya perawatan sarana dan prasarana lainnya. "Biaya perawatan kolam renang itu sangat tinggi, karena sirkulasi air kolam itu butuh daya listrik, karena kalau air tidak ada sirkulasinya, kolam akan cepat keruh, air akan berubah warga," ungkapnya.

Nah, terkait dengan persoalan itu Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana yang dikonfirmasi Minggu (20/9) mengakui, biaya pemiliharaan terhadap sarana dan prasarana pasca Porprov Bali ke XII menjadi persoalan serius. Bupati Putu Agus menyebut, pihaknya akan segera mendata sarana dan prasarana tersebut guna menghitung kebutuhan biaya perawatan keseluruhan. "Kita akan data secepatnya. Berapa sebenarnya kebutuhan dana pemeliharaan itu, dari situ baru kita pikirkan sumber-sumber pembiayaan itu," jelas mantan Ketua Komisi II DPRD Bali ini.

Bupati Putu Agus juga mengakui kalau biaya pemeliharaan kolam renang cukup tinggi. Dia pun pikirkan pola pengelolaan agar kolam tersebut terawat dan terpelihara dengan baik. Pola yang sedang dipikirkan adalah kolam itu harus dikelola oleh salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Harapannya, dengan dikelolah oleh salah satu BUMD, maka biaya perawatan kolam bisa ditanggung oleh BUMD tersebut. Namun pengalihan pengelolaan itu masih terkendala karena lahan kolam renang itu masih sebagai asset Provinsi Bali. "Kendalanya disitu, nanti kita akan coba bicarakan dengan rekan-rekan di DPRD, seperti apa pengelolaannya, karena biaya perawatannya memang cukup tinggi," terangnya.

Diberitakam sebelumnya, dua hari setelah cabang olah raga (Cabor) renang usai bertanding, kolam tersebut terkesan tidak ada yang mengurus. Selain terlihat kumuh, air kolam menjadi berubah warga kehijauan. Selain itu, pagar pengaman kolam juga rusak. Kondisi itu akibat warga memanfaatkan kolam itu untuk mandi sekaligus bermain. Disamping itu, mesin yang menjaga kualitas air kolam justru dimatikan, begitu Cabor renang berakhir. k19

Edisi : Senin, 21 September 2015

Hal : 4

HARIAN UMUM NusaBali

Tiga Tersangka Korupsi Dermaga Gunaksa Tercecer

★ Pasca Keluarnya SP3 Untuk Beberapa Tersangka Lain

DENPASAR, NusaBali

Setelah mengeluarkan rekomendasi Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk 3 kasus korupsi dan 2 kasus pencucian uang dalam kasus Dermaga Gunaksa, Klungkung, masih ada 3 tersangka lainnya yang nasibnya belum jelas. Ketiga tersangka merupakan pembeli tanah di Dermaga Gunaksa, Klungkung yang menerima ganti rugi dari pemerintah saat dilakukan pembebasan lahan.

Ketiga tersangka tersebut yaitu IB Susila, I Gusti Ayu Ardani dan Ni Luh Nyoman Hendrawati. Status ketiga tersangka ini sempat ditanyakan kepada jaksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, Akmal Kodrat usai menyampaikan keluarnya lima rekomendasi SP3 untuk kasus Dermaga Gunaksa pada Kamis (17/9) lalu. Namun, Akmal mengatakan tidak tahu perkembangan ketiga tersangka tersebut. "Ditanyakan saja langsung ke Kejari Klungkung yang menangani," ujarnya.

Namun lagi-lagi Kasipidsus Kejari Klungkung, Made Pasek yang dikonfirmasiMinggu (20/9) kemarin, bungkam dan tidak mau menjawab telpon. Bahkan SMS yang dikirimkan juga tidak pernah dibalas. Sementara itu, salah satu staf Kejari Klungkung malah mengatakan jika kasus untuk tiga tersangka ini tinggal menunggu pelimpahan saja alias sudah lengkap. "Kabarnya tinggal pelimpahan. Tapi pastinya dikonfirmasi ke Kasipidsus saja," ujar sumber jaksa yang enggan disebutkan namanya ini.

Seperti diketahui, 3 tersangka sisa dalam kasus Dermaga Gunaksa Klungkung yaitu IB Susila, Ardani dan Hendrawati ini merupakan pembeli tanah di lahan yang akan digunakan sebagai Dermaga Gunaksa. Namun pembelian tersebut dilakukan usai Pemkab Klungkung melakukan penetapan lokasi Dermaga Gunaksa. Dalam aturan, seharusnya tidak diperbolehkan dilakukan jual beli di atas lahan tersebut tanpa persetujuan Pemkab Klungkung.

Salah satu tersangka, IB Susila yang sempat dihadirkan sebagai saksi dalam perkara mantan Bupati Klungkung, I Wayan Candra menyatakan hanya mendengar di lokasi tersebut akan digunakan investor asing untuk membuat akomodasi wisata.

Karena tergiur dan ada tawaran warga yang menjual tanah, ia pun membeli tiga bidang tanah di lokasi tersebut dengan luas masing-masing 90 are, 34 are dan 69 are. Saat itu, Susila membeli sekitar bulan Oktober 2007 dengan harga Rp 8 juta per are. Baru sekitar 3 bulan, tepatnya pada Januari 2011 tanah yang dibelinya tersebut terkena pembebasan lahan untuk Dermaga Gunaksa. Susila mengaku hampir sebagian besar tanahnya terkena pembebasan dan dibayar Rp 14 juta per are.

Selain tiga tersangka ini, masih ada beberapa tersangka lainnya yang kasusnya sudah di SP3 atau dihentikan oleh kejaksaan dengan alasan tidak terbukti keterlibatannya. Rekomendasi SP3 ini dikeluarkan untuk 3 kasus korupsi Dermaga Gunaksa untuk tersangka Ni Made Anggara Juni Sari ST MSi, I Dewa Ayu Budhi Arini dan I Nengah Meregek. Sementara untuk kasus pencucian uang dalam kasus yang sama, SP3 dikeluarkan untuk Ni Made Anggara Juni Sari dan I Gusti Ayu Ardani. rez

Edisi : Senin, 21 September 2015

Hal : 3